

NAMA MEDIA : Suara Merdeka
TANGGAL : 24 Oktober 2023
KATEGORI : Hukum Pidana

MAKI: Bukti Sudah Cukup, Ketua KPK Seharusnya Jadi Tersangka

Sambungan dari hal 1

Sejumlah wartawan hanya melihat mobil Firli bernopol B 1990 RFP terparkir di belakang gedung utama Bareskrim. Sejak awal Firli memang menghindari awak media. Dia tidak masuk melalui pintu umum di lobi Bareskrim. Firli memilih masuk melalui gedung utama di mana ruang kerja Kapolri berada. Dia lantas melewati akses jembatan yang menghubungkan gedung utama dengan gedung Bareskrim.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya (PMJ) Kombespol Ade Safri Simanjuntak mengatakan, Firli hadir pukul 09.45 dan pemeriksaan dimulai pukul 10.00. Ketua KPK itu diperiksa penyidik Ditreskrimsus PMJ di kantor Dittipidkor Bareskrim. Pemeriksaan selesai pukul 19.30. "Kami tidak melakukan upaya paksa karena yang bersangkutan masih kooperatif," terangnya kemarin.

Penyidik Subdit Tipikor Ditreskrimsus PMJ telah menerima surat dari pimpinan KPK pada Senin (23/10) malam. Surat ter-

sebut ditujukan kepada Dittipidkor Bareskrim Polri dan Dirreskrimsus PMJ selaku penyidik. "Pada pokok suratnya adalah memohon agar mengizinkan pemeriksaan atau permintaan keterangan terhadap ketua KPK dilaksanakan di kantor Bareskrim Polri," jelasnya.

Ade Safri menerangkan, penyidik yang memeriksa Firli adalah gabungan dari PMJ dan Bareskrim. Namun, dia tidak membeberkan alasan Firli enggan diperiksa di PMJ.

Pemeriksaan Firli di Bareskrim mendapat kritik dari sejumlah pihak. Ketua IM57+ Institute Mochamad Praswad Nugraha mengatakan, permintaan diperiksa di Bareskrim itu menunjukkan sifat Firli yang ingin diistimewakan. "Mengapa tidak bisa tampil sebagai masyarakat biasa yang kedudukannya sama di depan hukum?" ucapnya kepada *Jawa Pos* kemarin.

IM57+ Institute meminta Firli tidak takut jika benar-benar merasa tidak bersalah. Firli harus membuktikan kata-katanya yang berkali-kali disampaikan bahwa

semua orang harus mematuhi hukum.

Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto mendesak PMJ segera mengumumkan status Firli. Jika sudah ditetapkan sebagai tersangka, Firli wajib nonaktif dari jabatannya. "Dan nanti kalau dilimpahkan ke pengadilan atau statusnya sebagai terdakwa, maka berhenti sebagai pimpinan KPK," paparnya.

Di sisi lain, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menerangkan, penelusuran MAKI memastikan bahwa bukti-bukti sudah cukup untuk menetapkan Firli sebagai tersangka. Karena itu, seharusnya PMJ segera menetapkan Firli sebagai tersangka.

Apalagi, pemeriksaan terhadap Firli telah dilakukan. Memang, umumnya setelah diperiksa terlapornya, dilakukan gelar perkara dan lantas ditetapkan sebagai tersangka. "Tapi, dua alat bukti sudah cukup. Lebih bagus lagi kalau ditambah dengan upaya paksa lainnya, misalnya penahanan," tuturnya. (elo/ygi/idr/c9/oni)